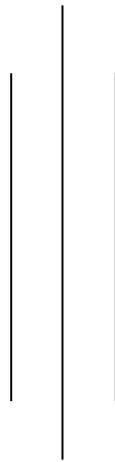




**PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MALANG**

Jl. A. Yani No. 98 Malang Telp. 491180



# Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

## Tahun 2019

LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ /35.73.402/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2019 memuat kerangka kebijakan, kegiatan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam mengemban visi dan misi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perubahan SKPD yaitu persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, penetapan renja Perubahan SKPD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen tertulis salah satunya yaitu Rencana Kerja (Renja). Dan apabila ada perubahan dalam penyesuaian kebutuhan di perbolehkan untuk mengusulkan RENJA Perubahan. Dokumen tersebut ditulis dengan mengacu dan berpedoman kepada landasan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Malang.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018 -2023. Renja Tahun 2020 memuat penjabaran visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Malang pada tahun 2020.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana kerja sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya

tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan politik kota Malang ini menggambarkan tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dan dalam penyusunannya diperlukan data atau dokumen yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi apabila di dalam masa satu tahun tersebut ada kegiatan harus ada penyesuan sesuai dengan kondisi lapangan dan peraturan baru yang wajib di jalankan oleh perangkat daerah maka diadakan perubahan demi efisiensi dan efektifitas masing-masing kegiatan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
4. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 Dan Pasal 26 Mengamanatkan Penyusunan PP Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (30 Mei 2016 Di Tunda Pelaksanaannya)
5. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 122 Diatur Masa Transisi Kesbangpol Tetap Melaksanakan Tugasnya Dan Dibiayai APBD
6. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 Dasar Pelaksanaan Dan Penganggaran Program Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
  15. Surat Edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 No. 050.12/7765/Sj Tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
  18. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  19. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
  20. Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2019, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2019 adalah untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dengan baik dan terkoordinasi, sesuai dengan tujuan masing-masing program dan kegiatan dan mengifisienkan dan mengefektifkan anggaran sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dan pokok bahasan dalam penulisan Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II :EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019
- 2.2 Review Terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019

Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sehingga perlu diadakan perubahan baik itu menggeser maupun menambah Pagu adalah sebagai berikut :

a. Program Kewaspadaan Daerah

1) Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah

Dalam penganggaran uang harian tidak di anggarkan dari unsur masyarakat sehingga diadakan pengalihan anggaran dari kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Daerah yang di dalam aturannya pemantauan dan evaluasi di lakukan oleh pemerintah yaitu ASN yang mempunyai kompetensi di bidang kewaspadaan daerah.

2) Penanganan Gangguan konflik sosial

- Penambahan di rekening perjalanan dinas karena akan di gunakan untuk persiapan jika ada undangan atau rakor dari provinsi dan kementerian

- Adanya kekurangan uang lembur karena pada DPA murni di gunakan untuk pemantauan Pemilu

3) Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Uang Harian ) di alihkan ke kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah menyesuaikan dengan aturan baru.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )  
Pembayaran Jasa TPOK di alihkan ke perjalanan dinas;

2) Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN )

Kegiatan ini berubah dalam rangka menambah pembuatan naskah akademis tentang Narkoba, sehingga yang semula kegiatan tersebut berada dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dan sesuai hasil konsultasi dengan Barenlitbang bahwa kegiatan tersebut harus di alihkan.

3) Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

c. Program Pemberdayaan Ormas dan LSM

1) Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM

Menyesuaikan kebutuhan bahwa Ormas dan LSM harus ditingkatkan yaitu dengan berkoordinasi.

2) Pengawasan Ormas dan LSM

Penambahan anggaran diperuntukan untuk memaksimalkan pengawasan Ormas dan LSM

d. Program Pendidikan dan Politik Masyarakat

1) Pemantapan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia  
Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena berpotensi double kegiatan dengan OPD lain yaitu dengan Bagian Hukum Kota Malang.

2) Verifikasi bantuan keuangan Parpol

Kegiatan ini di harapkan menambah pertemuan dan koordinasi dengan parpol penerima bantuan keuangan;

3) Peningkatan partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilu

Efisiensi anggaran sehingga sisa dari anggaran pengadaan di gunakan untuk kegiatan lain;

- 4) Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. Efisiensi anggaran sehingga sisa dari anggaran pengadaan di gunakan untuk kegiatan lain;
- e. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Adanya penambahan aplikasi SURADI sehingga mempengaruhi penambahan biaya pembayaran listrik;
  - 2) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  
Pada DPA murni anggaran kurang karena pada saat itu konsentrasi pada Pemilu sehingga kegiatan ini dipenuhi di anggaran Perubahan
  - 3) Pengadaan Peralatan Gedung  
Menyesuaikan dengan RKBU tahun 2018 dan 2019
  - 4) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional  
Pengadaan kendaraan Roda dua ( R2 ) sebanyak 3 Unit  
Meningkat kebutuhan yang selama ini kendaraan dinas operasional yaitu R2 sudah tidak layak pakai dan efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
  - 5) Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor  
Ada potensi anggaran tidak terserap sehingga bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
  - 6) Penataan Barang Milik Daerah  
Ada potensi anggaran tidak terserap sehingga bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1) Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur  
Perlu di adakan penambahan anggaran karena masih perlu untuk meningkatkan kapasitas pegawai Bakesbangpol kota Malang.
- g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  
Menyesuaikan kebutuhan
  - 2) Penyusunan laporan keuangan  
Menyesuaikan kebutuhan
  - 3) Penyusunan / review Renstra
  - 4) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota.  
Dialihkan pada program pengembangan wawasan kebangsaan yaitu pada kegiatan Fasilitasi peningkatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ( P4GN )

BAB III  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 3.1  
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG  
TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13	14	15
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan ( Pagu Indikatif )	Bertambah/berkurang				
Meningkatnya penyelesaian gangguan disintegrasi bangsa dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan	<b>Prosentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa</b>		65%	04 4 04 01 18	<b>Program Kewaspadaan Daerah</b>	<b>prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan</b>		<b>2.893.000.000</b>	<b>2.643.000.000</b>	<b>(250.000.000)</b>				
				4 04 01 18 001	Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi jumlah personil fasilitasi FORKOPIMDA	2 kali 200 org	230.000.000	230.000.000	-				Pimpinan Daerah
				4 04 01 18 006	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah tim Jumlah rekomendasi Jumlah kegiatan rakor	7 tim 10 rekom 10 kali	330.000.000	1.045.000.000	715.000.000	Berubah			5 Kecamatan di Wilayah Kota Malang
				4 04 01 18 010	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah tim Jumlah kegiatan	1 tim 4 giat	483.000.000	718.000.000	235.000.000	Berubah			Masyarakat Kota
				4 04 01 18 012	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan Jumlah personil Jumlah lokasi pemantauan Jumlah laporan	360 hari 908 org 2343 lokasi 12 kali	1.850.000.000	650.000.000	(1.200.000.000)	Berubah			5 Kecamatan di Wilayah Kota Malang
				04 4 04 01 15	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi</b>		<b>895.000.000</b>	<b>945.000.000</b>	<b>50.000.000</b>				
				4 04 01 15 001	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan	48 pertemuan	360.000.000	360.000.000	-	Berubah			Masyarakat Kota Malang
				4 04 01 15 003	Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi	245 org	95.000.000	95.000.000	-				Masyarakat Kota Malang

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran ( Rp)			Status (tetap/berubah/)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan ( Pagu Indikatif )	Bertambah/berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				4 04 01 15 00 7	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Review Perwal No 40 tahun 2013 tentang Narkotika	6 kegiatan	50.000.000	100.000.000	50.000.000	Berubah			6 kegiatan
				4 04 01 15 00 8	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Jumlah kegiatan	1 forum 5 kegiatan	100.000.000	100.000.000	-				1 forum dan 5 kegiatan
				4 04 01 15 00 9	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	jumlah peserta	100 org	50.000.000	50.000.000	-				Masyarakat Kota Malang
				4 04 01 15 00 5	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta	150 org	240.000.000	240.000.000	-	Berubah			Masyarakat Kota Malang
	<b>Prosentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan</b>		60 %	<b>04 4 04 01 16</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu</b>		<b>1.424.105.000</b>	<b>1.147.058.100</b>	<b>(277.046.900)</b>				
				4 04 01 16 00 1	Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah kegiatan Jumlah Ranperwal tentang RAD HAM	1 kali 1 dok	135.000.000	-	(135.000.000)	Berubah			Masyarakat Kota Malang dan Pemerintah Daerah
				4 04 01 16 00 2	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah proposal Parpol yang terverifikasi	10 parpol	50.000.000	40.985.000	(9.015.000)	Berubah			Partai Politik hasil pemilu 2014 dan pemilu 2019
				4 04 01 16 00 3	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Jumlah pelaku sosialisasi	800 org	500.000.000	454.402.100	(45.597.900)	Berubah			Masyarakat Kota Malang dan
				4 04 01 16 00 4	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Jumlah kegiatan sosialisasi	2 kali 1200 org	739.105.000	651.671.000	(87.434.000)	Berubah			Pemilih Pemula dan Stake
				<b>04 4 04 01 17</b>	<b>Program pemberdayaan Ormas dan LSM</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan</b>		<b>150.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>25.000.000</b>				
				4 04 01 17 00 1	Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah Ormas yang terdata	70 ormas	100.000.000	100.000.000	-	Berubah			Ormas di wilayah Kota

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran ( Rp)			Status (tetap/berubah/)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan ( Pagu Indikatif )	Bertambah/berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				4 04 01 17 00 2	Pengawasan Ormas dan LSM	Jumlah kegiatan pemantauan Jumlah Ormas yang dipantau	30 kali 70 ormas	50.000.000 75.000.000	25.000.000	Berubah				Ormas berbadan hukum, ormas tidak berbadan
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip		A	04 4 04 01 01	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>856.650.000</b>	<b>1.022.806.000</b>	<b>166.156.000</b>				
				4 04 01 01 00 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1000 surat	85.500.000	85.500.000	-				Bakesbangpol
				4 04 01 01 00 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	78.300.000	83.956.000	5.656.000	Berubah			Bakesbangpol
				4 04 01 01 00 7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan bangunan dan lahan yang dibersihkan	2050 m2	199.050.000	199.050.000	-				Bakesbangpol
				4 04 01 01 01 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar Jumlah buku peraturan	48 eksp 20 eksp	24.500.000	24.500.000	-				Pegawai Bakesbangpol
				4 04 01 01 01 4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin yang tersedia	12 bulan	72.900.000	72.900.000	-				Pegawai dan Tamu Bakesbangpol Kota Mala
				4 04 01 01 01 5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	140 OH 40 OH	351.400.000	511.900.000	160.500.000	Berubah			Pegawai Bakesbangpol
				4 04 01 01 02 3	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil	1 kali	25.000.000	25.000.000	-				Pegawai Bakesbangpol
				4 04 01 01 02 7	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	80 eksp	20.000.000	20.000.000	-				Pegawai Bakesbangpol dan Masyarakat Kota Malang
				04 4 04 01 02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>prosentase pemeliharaan sarana prasarana Aparatur</b>		<b>693.823.000</b>	<b>871.297.550</b>	<b>177.474.550</b>				

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran ( Rp)			Status (tetap/berubah/)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
								Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan ( Pagu Indikatif )	Bertambah/berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				4 04 01 02 00 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	18 jenis	211.778.000	327.770.000	115.992.000	Berubah			Seluruh aset Bakesbangpol
					Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yg tersedia	3 unit		86.680.000	86.680.000	Baru			
				4 04 01 02 01 5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 R4 dan 7 R2	165.000.000	168.940.000	3.940.000	Berubah			Kendaraan roda 2 dan 4 yang merupakan barang milik negara
				4 04 01 02 01 9	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 item	64.000.000	47.100.000	(16.900.000)	Berubah			Seluruh aset Bakesbangpol
				4 04 01 02 02 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung yg dipelihara/direhab	80 m2	203.045.000	203.045.000	-				Kantor Bakesbangpol Kota Malang
				4 04 01 02 04 0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yg akan dinilai	300 unit	50.000.000	37.762.550	(12.237.450)	Berubah			
				<b>04 4 04 01 05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>80.255.000</b>	<b>223.667.000</b>	<b>143.412.000</b>				
				4 04 01 05 00 8	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM	40 org	80.255.000	223.667.000	143.412.000	Berubah			Pegawai Bakesbangpol
				<b>04 4 04 01 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan yang tersedia</b>		<b>277.967.000</b>	<b>242.971.350</b>	<b>(34.995.650)</b>				
				4 04 01 06 00 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen lap capaian	15 dok	71.390.000	71.390.000	-				Penyusunan Program
				4 04 01 06 00 2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen lap keuangan	1 dok	81.577.000	96.581.350	15.004.350	Berubah			DPA Bakesbangpol
					Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renja	2 dok	75.000.000	75.000.000	-	Berubah			Penyusunan Program
				4 04 01 06 01 1		Jumlah Dokumen Renstra	1 dok							

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Pagu Anggaran ( Rp)			Status (tetap/berubah/)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran	
												Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan ( Pagu Indikatif )	Bertambah/berkurang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				4	04	01	06	01	4	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis/ Perda/ Perwal	1 NA	50.000.000	-	(50.000.000)	Berubah			
										<b>JUMLAH</b>		<b>7.270.800.000</b>	<b>7.270.800.000</b>	-					

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA MALANG

**ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710128 199703 1 004

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG  
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya								
1		<b>Program Kewaspadaan Daerah</b>	<b>Program Kewaspadaan Daerah</b>	<b>prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan</b>			<b>2.893.000.000</b>	<b>2.643.000.000</b>	
		Fasilitasi FORKOPIMDA	Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi jumlah personil fasilitasi FORKOPIMDA	2 kali 200 org	2 kali 200 org	230.000.000	230.000.000	
		Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah tim Jumlah rekomendasi Jumlah kegiatan rakor	7 tim 10 rekom 10 kali	7 tim 10 rekom 10 kali	330.000.000	1.045.000.000	pengalihan anggaran uang harian dari kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Daerah
		Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah tim Jumlah kegiatan	1 tim 4 giat	1 tim 4 giat	483.000.000	718.000.000	Penambahan di rekening perjalanan dinas dan penambahan honor lembur
		Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan Jumlah personil Jumlah lokasi pemantauan Jumlah laporan	360 hari 908 org 2343 lokasi 12 kali	360 hari 908 org 2343 lokasi 12 kali	1.850.000.000	650.000.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Uang Harian ) di alihkan ke kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah
2		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi</b>			<b>895.000.000</b>	<b>945.000.000</b>	
		Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan	48 pertemuan	48 pertemuan	360.000.000	360.000.000	Pembayaran Jasa TPOK di alihkan ke perjalanan dinas
		Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi	245 org	245 org	95.000.000	95.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Review Perwal No 40 tahun 2013 tentang Narkoba	6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000	100.000.000	Pembuatan naskah akademis tentang Narkoba
		Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum	1 forum	1 forum	100.000.000	100.000.000	
		Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta	100 org	100 org	50.000.000	50.000.000	
		Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta	150 org	150 org	240.000.000	240.000.000	
<b>3</b>		<b>Program pemberdayaan Ormas dan LSM</b>	<b>Program pemberdayaan Ormas dan LSM</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan</b>			<b>150.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	
		Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah Ormas yang terdata	70 ormas	70 ormas	100.000.000	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan bahwa Ormas dan LSM harus ditingkatkan yaitu dengan berkoordinasi
		Pengawasan Ormas dan LSM	Pengawasan Ormas dan LSM	Jumlah kegiatan pemantauan	30 kali	30 kali	50.000.000	75.000.000	Penambahan anggaran diperuntukan untuk memaksimalkan pengawasan Ormas dan LSM
				Jumlah Ormas yang dipantau	70 ormas	70 ormas			
<b>4</b>		<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu</b>			<b>1.424.105.000</b>	<b>1.147.058.100</b>	
		Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia	Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	135.000.000	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena berpotensi double kegiatan dengan OPD lain yaitu dengan Bagian Hukum Kota Malang
				Jumlah Ranperwal tentang RAD HAM	1 dok	1 dok			
		Verifikasi bantuan keuangan parpol	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah proposal Parpol yang terverifikasi	10 parpol	10 parpol	50.000.000	40.985.000	Kegiatan ini di harapkan menambah pertemuan dan koordinasi dengan parpol penerima bantuan keuangan

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Jumlah pelaku sosialisasi	800 org	800 org	500.000.000	454.402.100	Efisiensi anggaran sehingga sisa dari anggaran pengadaan di gunakan untuk kegiatan lain
				Jumlah Kegiatan	2 kali	2 kali			
		Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Jumlah pelaku sosialisasi	1200 org	1200 org	739.105.000	651.671.000	Efisiensi anggaran sehingga sisa dari anggaran pengadaan di gunakan untuk kegiatan lain
				Jumlah kegiatan	3 kali	3 kali			
5		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>856.650.000</b>	<b>1.022.806.000</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1000 surat	1000 surat	85.500.000	85.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	12 bulan	78.300.000	83.956.000	Adanya penambahan aplikasi SURADI sehingga mempengaruhi penambahan biaya pembayaran listrik
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan bangunan dan lahan yang dibersihkan	2050 m2	2050 m2	199.050.000	199.050.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah surat kabar	48 eksp	48 eksp	24.500.000	24.500.000	
				Jumlah buku peraturan	20 eksp	20 eksp			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin yang tersedia	12 bulan	12 bulan	72.900.000	72.900.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140 OH	140 OH	351.400.000	511.900.000	Pada DPA murni anggaran kurang karena pada saat itu konsentrasi pada Pemilu sehingga kegiatan ini dipenuhi di anggaran Perubahan
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 OH	40 OH			
		Peringatan/Kegiatan Insidentil	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil	1 kali	1 kali	25.000.000	25.000.000	
		Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	80 eksp	80 eksp	20.000.000	20.000.000	
<b>6</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>prosentase pemeliharaan sarana prasarana Aparatur</b>			<b>693.823.000</b>	<b>871.297.550</b>	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	18 jenis	18 jenis	211.778.000	327.770.000	Menyesuaikan dengan RKBU tahun 2018 dan 2019
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yg tersedia		3 unit		86.680.000	Pengadaan kendaraan Roda dua ( R2 ) sebanyak 3 Unit
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 R4 dan 7 R2	3 R4 dan 7 R2	165.000.000	168.940.000	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 item	15 item	64.000.000	47.100.000	Ada potensi anggaran tidak terserap sehingga bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung yg dipelihara /direhab	80 m2	80 m2	203.045.000	203.045.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yg akan dinilai	300 unit	300 unit	50.000.000	37.762.550	Ada potensi anggaran tidak terserap sehingga bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak
7		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>80.255.000</b>	<b>223.667.000</b>	
		Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM	40 org	40 org	80.255.000	223.667.000	meningkatkan kapasitas pegawai Bakesbangpol Kota Malang
8		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan yang tersedia</b>			<b>277.967.000</b>	<b>242.971.350</b>	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen lap capaian	15 dok	15 dok	71.390.000	71.390.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen lap keuangan	1 dok	1 dok	81.577.000	96.581.350	Menyesuaikan kebutuhan
		Penyusunan/ Reviu Renstra	Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renja	2 dok	2 dok	75.000.000	75.000.000	
				Jumlah Dokumen Renstra	1 dok	1 dok			
		Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis/ Perda/ Perwal	1 NA	1 NA	50.000.000	-	Dialihkan pada program P4GN
		<b>JUMLAH</b>					<b>7.270.800.000</b>	<b>7.270.800.000</b>	

Mengetahui,  
 PIt. KEPALA BARENLITBANG  
 KOTA MALANG

Malang, Juli 2019  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST., MT  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19730425 199803 1 004

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710128 199703 1 004

Tabel 2.2  
Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	<b>Progam Kewaspadaan Daerah</b>	<b>prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan</b>			<b>2.893.000.000</b>	<b>717.152.400</b>	<b>Progam Kewaspadaan Daerah</b>	<b>prosentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan</b>		<b>2.643.000.000</b>		
1	Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi jumlah personil fasilitasi FORKOPIMDA	2 kali 200 org	SPPD (1 org)	230.000.000	22.525.000	Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi jumlah personil fasilitasi FORKOPIMDA	2 kali 200 org	230.000.000		
2	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah tim Jumlah rekomendasi Jumlah kegiatan rakor	7 tim 10 rekom 10 kali	Rakor (30 org)	330.000.000	168.208.500	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah tim Jumlah rekomendasi Jumlah kegiatan rakor	7 tim 10 rekom 10 kali	1.045.000.000	pengalihan anggaran uang harian dari kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Daerah	
3	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah tim Jumlah kegiatan	1 tim 4 giat	SPPD (4 org)	483.000.000	168.011.300	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah tim Jumlah kegiatan	1 tim 4 giat	718.000.000	Penambahan di rekening perjalanan dinas dan penambahan honor lembur	
4	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan Jumlah personil Jumlah lokasi pemantauan Jumlah laporan	360 hari 908 org 2343 lokasi 12 kali	SPPD, Rakor (50 org)	1.850.000.000	358.407.600	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan Jumlah personil Jumlah lokasi pemantauan Jumlah laporan	360 hari 908 org 2343 lokasi 12 kali	650.000.000	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Uang Harian ) di alihkan ke kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi</b>			<b>895.000.000</b>	<b>81.986.500</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>prosentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi</b>		<b>945.000.000</b>		
5	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan	48 pertemuan	27 pertemuan	360.000.000	63.652.500	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan	48 pertemuan	360.000.000	Pembayaran Jasa TPOK di alihkan ke perjalanan dinas	
6	Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi	245 org	-	95.000.000	-	Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaanl	jumlah peserta sosialisasi	245 org	95.000.000		
7	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Review Perwal No 40 tahun 2013 tentang Narkoba	6 kegiatan	-	50.000.000	-	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Review Perwal No 40 tahun 2013 tentang Narkoba	6 kegiatan	100.000.000	Pembuatan naskah akademis tentang Narkoba	
8	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum	1 forum	-	100.000.000	1.825.000	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum	1 forum	100.000.000		
		Jumlah kegiatan	5 kegiatan	-				Jumlah kegiatan	5 kegiatan			
9	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	jumlah peserta	100 org	-	50.000.000	-	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	jumlah peserta	100 org	50.000.000		
10	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta	150 org	SPPD	240.000.000	16.509.000	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta	150 org	240.000.000		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	<b>Program pemberdayaan Ormas dan LSM</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan</b>			<b>150.000.000</b>	<b>17.593.000</b>	<b>Program pemberdayaan Ormas dan LSM</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan</b>		<b>175.000.000</b>		
11	Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah Ormas yang terdata	70 ormas	-	100.000.000	3.164.500	Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah Ormas yang terdata	70 ormas	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan bahwa Ormas dan LSM harus ditingkatkan yaitu dengan berkoordinasi	
12	Pengawasan Ormas dan LSM	Jumlah kegiatan pemantauan	30 kali	-	50.000.000	14.428.500	Pengawasan Ormas dan LSM	Jumlah kegiatan pemantauan	30 kali	75.000.000	Penambahan anggaran diperuntukan untuk memaksimalkan pengawasan Ormas dan LSM	
		Jumlah Ormas yang dipantau	70 ormas					Jumlah Ormas yang dipantau	70 ormas			
IV	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu</b>			<b>1.424.105.000</b>	<b>1.057.190.200</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>prosentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu</b>		<b>1.147.058.100</b>		
13	Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah kegiatan	1 kali	-	135.000.000	-	Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah kegiatan	1 kali	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena berpotensi dobel kegiatan dengan OPD lain yaitu dengan Bagian Hukum Kota Malang	
		Jumlah Ranperwal tentang RAD HAM	1 dok					Jumlah Ranperwal tentang RAD HAM	1 dok			
14	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah proposal Parpol yang terverifikasi	10 parpol	7 parpol (21 org)	50.000.000	20.547.000	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah proposal Parpol yang terverifikasi	10 parpol	40.985.000	Kegiatan ini di harapkan menambah pertemuan dan koordinasi dengan parpol penerima bantuan keuangan	
15	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Jumlah pelaku sosialisasi	800 org	761 org (2 kali)	500.000.000	433.396.100	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Jumlah pelaku sosialisasi	800 org	454.402.100	Efisiensi anggaran sehingga sisa dari anggaran pengadaan di gunakan untuk kegiatan lain	
		Jumlah Kegiatan	2 kali					Jumlah Kegiatan	2 kali			
16	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Jumlah pelaku sosialisasi	1200 org	3 kali (1168 org)	739.105.000	603.247.100	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Jumlah pelaku sosialisasi	1200 org	651.671.000	Efisiensi anggaran sehingga sisa dari anggaran pengadaan di gunakan untuk kegiatan lain	
		Jumlah kegiatan	3 kali					Jumlah kegiatan	3 kali			

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>856.650.000</b>	<b>416.274.142</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>1.022.806.000</b>		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1000 surat	649 surat & 131 RPKL	85.500.000	75.394.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	1000 surat	85.500.000		
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	3 bln	78.300.000	31.802.897	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik	12 bulan	83.956.000	Adanya penambahan aplikasi SURADI sehingga mempengaruhi penambahan biaya pembayaran listrik	
19	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan bangunan dan lahan yang dibersihkan	2050 m2	2050 m2	199.050.000	103.468.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan bangunan dan lahan yang dibersihkan	2050 m2	199.050.000		
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	48 eksp	12 eksp	24.500.000	9.281.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	48 eksp	24.500.000		
		Jumlah buku peraturan	20 eksp					Jumlah buku peraturan	20 eksp			
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin yang tersedia	12 bulan	3 bln	72.900.000	37.166.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah mamin yang tersedia	12 bulan	72.900.000		
22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140 OH	19 OH & 23 OH	351.400.000	156.556.470	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140 OH	511.900.000	Pada DPA murni anggaran kurang karena pada saat itu konsentrasi pada Pemilu sehingga kegiatan ini dipenuhi di anggaran Perubahan	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 OH					Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 OH			
23	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil	1 kali	-	25.000.000	-	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil	1 kali	25.000.000		
24	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	80 eksp	34 eksp	20.000.000	2.605.275	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	80 eksp	20.000.000		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>prosentase pemeliharaan sarana prasarana Aparatur</b>			<b>693.823.000</b>	<b>151.925.705</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>prosentase pemeliharaan sarana prasarana Aparatur</b>		<b>871.297.550</b>		
25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	18 jenis	-	211.778.000	89.217.105	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	18 jenis	327.770.000	Menyesuaikan dengan RKBU tahun 2018 dan 2019	
							Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yg tersedia	3 unit	86.680.000	Pengadaan kendaraan Roda dua ( R2 ) sebanyak 3 Unit	
26	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 R4 dan 7 R2	3 R4 dan 7 R2	165.000.000	52.493.600	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 R4 dan 7 R2	168.940.000		
27	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 item	3 jenis	64.000.000	3.135.000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 item	47.100.000	bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak	
28	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung yg dipelihara/direhab	80 m2	-	203.045.000	7.080.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung yg dipelihara/direhab	80 m2	203.045.000		
29	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yg akan dinilai	300 unit	-	50.000.000	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yg akan dinilai	300 unit	37.762.550	Ada potensi anggaran tidak terserap sehingga bisa di manfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak	
<b>VII</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>80.255.000</b>	<b>57.521.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>223.667.000</b>		
30	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM	40 org	40 org	80.255.000	57.521.000	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM	40 org	223.667.000	meningkatkan kapasitas pegawai Bakesbangpol Kota Malang	
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan yang tersedia</b>			<b>277.967.000</b>	<b>89.903.300</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan yang tersedia</b>		<b>242.971.350</b>		
31	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen lap capaian	15 dok	3 dok (Lakip, PK, Rencana Aksi)	71.390.000	42.374.900	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen lap capaian	15 dok	71.390.000		
32	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen lap keuangan	1 dok	Honorarium PNS	81.577.000	47.001.600	Penyusunan laporan keuangan	jumlah dokumen lap keuangan	1 dok	96.581.350	Menyesuaikan kebutuhan	
33	Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renja	2 dok	-	75.000.000	526.800	Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah Dokumen Renja	2 dok	75.000.000		
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dok					Jumlah Dokumen Renstra	1 dok			
34	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis/ Perda/ Perwal	1 NA	-	50.000.000	-	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah Naskah Akademis/ Perda/ Perwal	1 NA	-	Dialihkan pada program P4GN	
	<b>JUMLAH</b>				<b>7.270.800.000</b>	<b>2.589.546.247</b>				<b>7.270.800.000</b>		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA MALANG

**ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710128 199703 1 004

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2019.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi 24 kegiatan yang mengalami pergeseran dan penambahan kode rekening. Rencana program ini hanya merupakan program dasar, sedangkan untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik, keamanan, dan kebencanaan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat kota Malang.

Malang, 2019  
Kepala Bakesbangpol Kota Malang

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710128 199703 1 004